

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Internet

- Amirudin, 2004, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Campbell Black, Henry, 1990, *Black's Law Dictionary. Six Edition*, Wes Publishing Co, St. Paul.
- C. P. Pongoh, Helmy, Manfaat Perdamaian Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, *Jurnal Elektronik bagian Hukum dan Masyarakat (Lex Et Societatis)*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. III/No.9/Okt/2015, hlm. 147 – 151.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- , 2010, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishak, Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Faklutas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh, No. 65, Th. XVII, April 2015.
- Kusumasari, Diana, “Pembatalan Akta Perdamaian”, www.hukumonline.com, diakses 7 Juli 2019
- M. Sinaga, Syamsudin, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Martono, Nanang, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada – Jakarta.
- Muttaqien Raisul, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.
- Nurdin, Adriani, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Rudy A. Lontoh, et al., 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI-Press, Jakarta.
- , 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suyudi, Aria, DKK, 2003, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- SW. Sumardjono, Maria, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wijayanta, Tata, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Vol. 14 No. 2 Mei 2014. Hlm 216 – 226.
- , Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Mimbar Hukum*, Yogyakarta, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, hlm. 1 – 13.
- , Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 22, Nomor 2, Februari 2010, hlm. 330 – 346.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Undang – Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak suara Kreditor

Responden

Silalahi, Tonggo, 2019 Perbandingan Penyelesaian Perdamaian Proses Kepailitan Dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 *Wawancara*, Jakarta, 14 Juni.

Sugih, Tommy, 2019 Perbandingan Penyelesaian Perdamaian Proses Kepailitan Dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 *Wawancara*, Jakarta, 13 Juni.

Tejaningsih, Titik, 2019, Perbandingan Penyelesaian Perdamaian Proses Kepailitan Dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 *Wawancara*, Jakarta, 27 Juni.

Yunus, Tisye, 2019, Perbandingan Penyelesaian Perdamaian Proses Kepailitan Dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 *Wawancara*, Jakarta, 13 Juni.